



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																							v								

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

TAHUN

2016

HALAMAN

C1

Lima Parpol Terancam Tak Terima Dana Bantuan

KEPATUHAN sejumlah Partai Politik (Parpol) dalam mempertanggungjawabkan dana bantuan politik (Banpol) yang diberikan pemerintah tampak perlu dipertegas lagi.

Sebab, hingga waktu yang ditentukan, masih saja ada Parpol yang "bandel" tak menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana banpol yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nunukan.

Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Kesbangpol Nunukan, Muhtar SH menyebutkan, saat ini ada 9 Parpol yang berhak menerima banpol berdasarkan jatah kursi

di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan. Namun, dua parpol diantaranya kini tak dapat menerima karena sedang mengalami permasalahan internal.

"9 parpol itu, Demokrat, Golkar, Gerindra, Hanura, PDIP, PKS, PBB, PPP dan PAN. Serta yang tidak menerima banpol 2015 yakni PPP dan Golkar," sebut Muhtar kepada *Radar Nunukan* (Radar Tarakan Group), Senin (24/2).

Kendati demikian, kata Muhtar, dari 7 parpol yang menerima, hanya 2 parpol yang telah me-

nyerahkan SPj-nya ke pihaknya. Sementara sisanya belum. Padahal, pihaknya telah mnyampaikan surat pemberitahuan agar Parpol dapat memenuhi kewajibannya.

"Saat ini baru PAN dan PKS yang menyerahkan SPj. Jadi tinggal 5 Parpol yang belum menyerahkan," ungkapnya. "Surat pertama sudah, yang kedua segera menyusul hingga yang ketiga kami bawa BPK ke kantor Parpol untuk memeriksa langsung. Seharusnya, akhir Januari batas waktunya. Namun, kami memberikan waktu hingga Maret

karena waktu proses pencairan dan SPj sangat singkat," tegasnya.

Bagi Parpol yang tak menyerahkan SPj penggunaan dana bantuan itu, kata Muhtar, tentu ada sanksi yang diberikan. Salah satunya, dana banpol yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nunukan di 2016 ini tak dicairkan lagi.

"Walaupun dana banpol tidak habis digunakan, SPj dapat dilakukan di tahun selanjutnya dengan syarat memperlihatkan dana masih ada di Bank," jelasnya.

Dikonfirmasi terkait persoalan ini, Sekretaris Partai Demokrat, Drs. Josef Murang menjelaskan, lambatnya SPj penggunaan dana dilaporkan ke Kesbangbol bukan karena kesengajaan. Apalagi jika dikatakan bandel. Itu tidak benar. Sebenarnya, lanjutnya, waktu pencairan dana hingga pembuatan SPj sangat dekat. Sementara, untuk menyelesaikan SPj membutuhkan waktu. Makanya ada keterlambatan.

"Waktu pencairan, Desember lalu sedangkan permintaan SPj

akhir Januari 2016 waktu yang diberikan sangat singkat," ungkap politisi berlambang mersi ini.

Dijelaskan, saat ini pihaknya sedang memproses penyusunan SPj, dikarenakan sejumlah kegiatan baru saja selesai dilak

"Proses pelaporan sesul...
na hampir rampung. Pendidikan politik yang kami utamakan dan operasional parpol juga menjadi bagian sehingga dana banpol yang diberikan digunakan dengan semestinya," pungkasnya mengakhiri. (*/akz)

Click to close imi